



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara
(1998-2013)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Nayeon Ha
2012330224

Bandung
2017



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara
(1998-2013)**

Skripsi

Oleh

Nayeon Ha

2012330224

Pembimbing

Bob Sugeng Hadiwinata, Ph. D

Bandung

2017

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Nayeon Ha
Nomor Pokok : 2012330224
Judul : Kebijakan Luar Negeri Kotra Selatan terhadap Korea Utara

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 19 Juli 2017
Dan dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Ratih Indraswari, S.IP., MA.

: 

Sekretaris
Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, Ph.D

: 

Anggota
Albert Triwibowo, S.IP., MA.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nayeon Ha

NPM : 2012330224

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara (1998-2013)

Dengan ini menyatakan bahwa seminar ini merupakan hasil karya saya sendiri dengan sebenar-benarnya. Adapun sumber-sumber yang saya kutip telah melalui proses pengambilan intisari dan diwujudkan dengan bahasa saya sendiri. Segala bentuk kemungkinan adanya kesamaan merupakan ketidaksengajaan dan tanpa maksud untuk melakukan plagiarisme.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensinya apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 5 Juli 2017



Nayeon Ha

ABSTRACT

Name : Nayeon Ha
Student ID : 2012330224
Title : Republic of Korea's Foreign Policy towards Democratic People's Republic of Korea (1998-2013)

This research describes Republic of Korea's foreign policy towards Democratic People's Republic of Korea under the leadership of President Daejung Kim, President Moohyun Roh and President Myungbak Lee in 1998-2013 in the situation of nuclear crisis. The theory is applied in this thesis is two level game theory, political model of international conflict resolution at both the domestic level and the international level originally introduced in 1988 by Robert Putnam, to know the explanation of relations between South Korea and North Korea. Different foreign policy of South Korea towards North Korea under this 3 president is quite interesting to be studied. Through the analysis, this research has found that both the domestic level such as political party system and public opinion and international level such as presidential election of United States and United Nations sanction on North Korea affect the South Korea's foreign policy.

Keywords : South Korea, North Korea, Sunshine Policy, Two level game theory

ABSTRAK

Nama : Nayeon Ha
NPM : 2012330224
Judul : Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara
(1998-2013)

Penelitian ini mendeskripsikan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara di bawah Presiden Daejung Kim, Presiden Moohyun Roh dan Presiden Myungbak Lee pada tahun 1998-2013 dalam situasi krisis nuklir. Teori yang diterapkan dalam skripsi ini adalah Two level game theory, dimana model politik untuk resolusi konflik internasional baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional yang dikenalkan pada tahun 1988 oleh Robert Putnam, untuk mengetahui hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Kebijakan luar negeri Korea Selatan di bawah 3 presiden ini cukup menarik untuk dikaji. Melalui analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa baik tingkat domestik seperti sistem partai politik dan opini publik maupun tingkat internasional seperti pemilihan umum presiden Amerika Serikat dan sanksi PBB terhadap Korea Utara mempengaruhi kebijakan luar negeri Korea Selatan.

Kata kunci : Korea Selatan, Korea Utara, Sunshine Policy, Two level game theory

Preface

First of all, the author would like to give thank to people around me during the thesis writing. It has been a pleasure for me to write this thesis that I began since September 2016. At long last I completed this thesis that have the title "Republic of Korea's strategy and diplomacy towards DPRK" as the final examination to attain the Bachelor Degree of Social and Political Sciences at Parahyangan Catholic University. The author also would to thank Mr. Bob Sugeng Hadiwinata, Ph.d, as the author's advisor, who has been patient guiding the author in the making this thesis as well as the splendid knowledge that is very useful for the author to finish this thesis.

The author chose this topic due to high interest in inter-Korea relations. This thesis has been a huge challenge for the author. The author admits that this research might still be far from perfect. It still contains many mistakes. Thus, the author is pleasantly accepting critics and suggestions in order to make this thesis better. The author hopes that this thesis could contribute in enriching knowledge to the further study of International Relations.

With regards,

Nayeon Ha

Acknowledgements

First and foremost, I would like to thank my parents for their support to me mentally and financially. Thank you for making this thesis possible until it finished. Mom and Dad, I can't thank you enough for your all unconditional love and support. To Dad, thank you for everything you have given to me. You are the warmest man I have ever had. Then Mom, you are the wisest woman I have ever had. Your daughter is now being a grown up woman who is already to begin a new adventures ahead. I have the greatset respect for you, mom and dad. To my only one brother, because of you, i can learn about responsibility and sacrifice. Thank you for being my brother. I love you unconditionally as mom and dad do. Lastly, to Krystal and Joy, my lovely 2 roomates, family and friends. Thank you, as always, for being with me in Indonesia. Thank you for being a good listener for every never ending story that I have. Both of you made me a better person. I promise I will always back you up, all the way.

Thank you again to Mr. Bob Sugeng Hadiwinata, Ph.d that has given me plenty of knowledge, sincere advise and words of encouragement.

I have met many amazing people in campus.

First of all, I thank Aprilia Listiani Tanjung, It's been 5 years full of happiness of us. I have learned a lot of things from you. Thank you so much has been there

every day by my side. Maybe you don't know how big your part takes in my life.

Pril, I really Thank god for having you in my life

Raben (April, Tongtong, Tania, Baby, Chacha, Ci Santi, Yella, Ci Livia, Lele, Metta, Marcel, Billy, Iwan, Waris, Jo, Ko Kelvin, Ronny, Aldo, Ahui) Thank you for being the part of my unforgettable campus life. You guys are the most precious friends for my entire life. Thank you so much guys... Thanks to you guys, the time I lived here under the name of Luna was so VALUABLE and HAPPY as much as i had lived in Korea with name of Nayeon. I will see you guys on top!

I am also greatly indebted to my friend, Sabe. You had helped me edit and correct my Bahasa Indonesia for this thesis and encouraged me to keep going for the past.

I would be glad to help you in any way I can. I have no words to express my thanks

Last, but not least, to Ma Mr, Right. Thank you for being my source of happiness, expectation for the future and part of my plan. Thank you for staying by my side. I just want to spend every possible minute with you. I promise, we will be together and stay together so many years.

One final word is thank you all.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
ABSTRACT.....	i
ABSTRAK.....	ii
Preface.....	i
Acknowledgements	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	17
1.2.1 Perumusan Masalah	21
1.2.2 Pembatasan Masalah	21
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	22
1.4 Kerangka Pemikiran	22
1.5 Kajian Pustaka	25
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	28
1.6.1 Metode Penelitian.....	28
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	28

1.7	Sistematika Pembahasan	28
BAB II		30
KEBIJAKAN TERHADAP KOREA UTARA DI BAWAH PARTAI		
PROGRESIF SELAMA 10 TAHUN		30
2.1	Masa Pemerintahan Daejung Kim	30
2.1.1	New Paradigm, Sunshine Policy	31
2.1.2	Analisis Masa Pemerintahan Daejung Kim	38
2.2	Masa Pemerintahan Moohyun Roh	40
2.2.1	Analisis Masa Pemerintahan Moohyun Roh	46
BAB III		49
KEBIJAKAN BARU TERHADAP KOREA UTARA DI BAWAH PARTAI		
KONSERVATIF		49
3.1	Latar Belakang Kebijakan Baru	49
3.2	Masa Pemerintahan Myungbak Lee	51
3.2.1	Kebijakan Bebas Nuklir dan Pintu Terbuka 3000	66
3.2.2	Analisis Masa Pemerintahan Myungbak Lee	72
BAB IV		77
RUNTUHNYA HARAPAN UNIFIKASI		
4.1	Unifikasi kedua Korea	77
4.2	Dampak terhadap Rencana Reunifikasi kedua Korea	80

BAB V	89
KESIMPULAN	89
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Awal mula sejarah Korea ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan yang mendominasi Semenanjung Korea seperti Goguryeo, Silla, Baekje, Balhae dan Goryeo. Banyaknya perang yang terjadi antara kerajaan-kerajaan tersebut, masa perang berakhir dengan berdirinya kerajaan terakhir di Semenanjung Korea yang disebut sebagai Dinasti Joseon pada tahun 1392.¹ Dinasti Joseon mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada tahun 1863, terdapat seorang pendukung utama isolationisme naik takhta yang bernama Kaisar Gojong. Saat itu banyak orang Joseon yang membenci pengaruh asing di atas tanah mereka. Di abad ke 19, Joseon mencoba untuk mengontrol pengaruh asing dengan menutup semua perbatasan sehingga hubungan perdagangan dengan negara lain terhambat.² Kaisar Gojong bersikeras bahwa pihak asing hanya akan memanfaatkan kepentingan Joseon. Perancis dan Amerika Serikat meminta Joseon kembali membuka hubungan dagang dan budaya dengan dunia luar, namun permintaan ini ditolak. Setelah Restorasi Meiji pada tahun 1868, Jepang pun meminta Joseon untuk membuka diri, tetapi

¹ T'ae-don No, *Samguk T'ongil Chŏnjaengsa*, 1st ed. (Sŏul: Sŏul Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 2009). hal 19

² Yongwook Kim, "Korea: History Of Korea: Dynastic Period", *Koreaorbit.Com*, last modified 2011, accessed March 11, 2017, <http://www.koreaorbit.com/history-of-korea/history-of-korea-dvnasties.html>.

permintaan tersebut juga ditolak.³ Pada tahun 1905, Jepang memaksa Joseon untuk menandatangani Perjanjian Eulsa⁴ yang menjadikan Joseon sebagai protektorat Jepang, kemudian pada 1910 Jepang mulai menjajah Semenanjung Korea. Melalui Perjanjian Aneksasi Jepang-Korea. Banyak infrastruktur yang dibangun di seluruh Semenanjung Korea oleh pemerintahan kolonial Jepang hanya untuk melancarkan kepentingan dan perdagangan Jepang. Jepang melakukan banyak kejahatan penjajahan atas Korea seperti perbudakan seks terhadap wanita Korea, mengenakan pajak yang tinggi terhadap hasil pertanian, mengirimkan pekerja ke teritori Jepang untuk kerja paksa dan lain sebagainya.⁵ Penjajahan Jepang terhadap Korea berakhir dengan penyerahan Jepang kepada Blok Sekutu pada tahun 1945 akhir Perang Dunia II.

Seperti yang terjadi pada banyak negara lainnya, akhir Perang Dunia II ditandai dengan berbagai perbatasan baru. Pada Desember 1945, Komisi bersama AS dan Uni Soviet memutuskan bahwa Semenanjung Korea akan merdeka di bawah kepemimpinan dewan perwalian setelah maksimum lima tahun di Konferensi Menteri Luar Negeri Moskwa tanpa melibatkan pihak Korea.⁶ Pada tahun berikutnya, Amerika Serikat dan Soviet membuat perjanjian untuk membagi Korea menjadi dua walaupun hampir seluruh bangsa Korea menolak perjanjian ini.

³ Hyo-sun Kim, *Chaejo Ilbonin I Kŭrin Kaehwagi Chosŏn Ŭi P'unggyŏng*, 6th ed. (Seoul: e-dream, n.d.). hal 81

⁴ Woo-bong Ha, "Wonjunggeo'S Understanding For The Relation History Between Korea And Japan - Focusing On The Hwagukji-", *The Korea-Japan Historical Review* 50, no. 349 (2015): 35.

⁵ "일제의 민족 말살 정책과 경제적 수탈", *Terms.Naver.Com*, last modified 2006, accessed March 29, 2017, <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3550860&cid=58584&categoryId=58623>.

⁶ Richard J. H Johnston, *Getting To Know The Two Koreas*, 13th ed. (New York: Coward, McCann & Geoghegan, 1971). hal 22

⁷Amerika Serikat dan Uni Soviet masing-masing mendirikan pemerintahan militer yang bersifat sementara di bagian selatan dan di bagian utara Semenanjung Korea sebagai wilayah perwalian. Pada akhirnya, dua sisi Korea terbelah di 38 derajat lintang utara - dan alasan ini adalah mengapa perbatasan antara kedua negara sering disebut sebagai '*38th parallel*'.⁸ Tujuan perwalian ini adalah untuk mendirikan pemerintahan Korea yang bersifat sementara yang akan menjadi "bebas dan merdeka pada waktunya". Pada saat itu, di Korea Selatan ada seorang anti komunis bernama Syngman Rhee, yang pindah kembali ke Korea setelah puluhan tahun di Amerika Serikat. Ia dianggap sebagai calon yang dapat diterima untuk memimpin negeri ini oleh pihak Amerika Serikat karena keramahannya kepada Amerika Serikat.⁹ Berbeda dengan bagian utara saat itu, tentara Uni Soviet membentuk Penguasa Sipil Soviet untuk memerintah negeri tersebut hingga ramah kepada Uni Soviet. Pada akhirnya pemerintah sementara yang disebut Komite Rakyat Sementara Korea Utara dibentuk di bawah pimpinan Kim Il-sung,¹⁰ yang telah menghabiskan beberapa tahun untuk berlatih perang bersama pasukan Uni Soviet. Dengan meningkatnya ketidakpercayaan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, tidak ada persetujuan yang berhasil mengenai cara untuk mendamaikan pemerintah sementara. Amerika Serikat membawa masalah ini ke

⁷ Arthur Mitchell, *Understanding The Korean War*, 1st ed. (Jefferson, N.C.: McFarland & Company, Inc., 2013). hal 163

⁸ "개관 < 교역 및 경험 < 남북교류협력 < 알림마당 < 통일부", *Unikorea.Go.Kr*, last modified 2011, accessed March 31, 2017, <http://www.unikorea.go.kr/content.do?cmsid=1429>.

⁹ "Lee Wha Rang, Who Was Rhee Syngman?", *Hartford-Hwp.Com*, last modified 2014, accessed February 16, 2017, <http://www.hartford-hwp.com/archives/55a/186.html>.

¹⁰ Andrew C Nahm, *Introduction To Korean History And Culture*, 9th ed. (Elizabeth: Hollym, 2006).

hadapan PBB pada tahun 1947. Dan pada tanggal 14 November 1947, ¹¹sidang umum PBB memutuskan untuk membentuk komisi sementara PBB untuk Korea. Dari hasil sidang tersebut PBB menyarankan agar selambat-lambatnya pada tanggal 13 Maret 1948, Korea mengadakan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat Korea.¹² Tetapi Uni Soviet menentang keterlibatan PBB. Dan Korea Utara pun menolak ikut serta dalam pemilihan umum yang diawasi PBB. Jadi pada tanggal 10 Mei 1948, hingga Korea Selatan yang mengadakan pemilihan umum. Hasilnya menunjukkan Syngman Rhee sebagai presiden dan ia mendirikan Republik Korea Selatan yang berlandaskan sistem demokrasi dan kapitalisme secara resmi pada 15 Agustus 1948. Demikian juga atas dukungan Uni Soviet, lahir pemerintah komunis Komunis Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Il-sung berdasarkan komunisme pada 9 September 1948.¹³ Pada Desember 1948, sidang umum PBB mengesahkan laporan tentang hasil-hasil pemilihan umum di Korea. Sidang menyatakan bahwa pemerintahan Korea Selatan adalah satu-satunya pemerintahan yang sah. Dengan adanya keputusan tersebut, hubungan Korea Utara terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat semakin memburuk. Korea Utara merasa hak-haknya tidak diakui PBB.¹⁴ Ketegangan antara kedua belah pihak memanas ketika Perang Korea terjadi pada tahun 1950 ketika Korea Utara menyerang Korea Selatan.

¹¹ Kee Kwang-Seo, "The Soviet Union's Policy Plan Toward Korea And Its View Of Korean Independence Movement Before Liberation Of Korea", *The Korean Journal of Slavic Studies* 30, no. 4 (2014): 29-57.

¹² Joseph C Goulden, *Korea, The Untold Story Of The War*, 12th ed. (New York: McGraw-Hill, 1983). hal 17

¹³ Donald W. Boose, "War And Democracy: A Comparative Study Of The Korean War And The Peloponnesian War (Review)", *Korean Studies* 26, no. 2 (2002): 314-316.

¹⁴ Bruce Cumings, *The Origins Of The Korean War*, 5th ed. (Princeton, N.J.: Princeton University Press. 1989). hal 67

Pada tanggal 25 Juni 1950, militer Korea Utara menyeberangi perbatasan dan melakukan invasi atas Korea Selatan dengan alasan membalas provokasi Korea Selatan. Pada 27 Juni 1950, Presiden Truman memerintahkan angkatan udara dan laut AS untuk membantu rezim Korea Selatan.¹⁵ Perang Korea tidak hanya sebatas perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Tetapi, dibelakang negara tersebut ada sekutu masing-masing. Sekutu utama Korea Selatan adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Britania Raya, meskipun banyak negara lain mengirimkan tentara di bawah bendera PBB. Sekutu Korea Utara, seperti Republik Rakyat Tiongkok menyediakan kekuatan militer, dan Uni Soviet yang menyediakan penasihat perang, pilot pesawat, dan juga persenjataan untuk pasukan Tiongkok dan Korea Utara¹⁶. Oleh karena itu Perang ini sering disebut "pedang yang dimandatkan" antara Amerika Serikat bersama sekutu PBBnya dengan komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerjasama dengan Uni Soviet.¹⁷ Perang Korea yang berlangsung selama tiga tahun, memakan korban sekitar tiga juta jiwa. Pada tanggal 27 Juli 1953, diberlakukan gencatan senjata antara pihak Korea Utara dan Korea Selatan. Secara teknis konflik ini masih berlanjut hingga sekarang karena belum ada perjanjian perdamaian.¹⁸

Setelah 1953, tahun-tahun setelahnya masih banyak konflik kecil yang

¹⁵ Donovan, Robert J (1996). *Tumultuous Years: The Presidency of Harry S. Truman 1949-1953*. University of Missouri Press. p. 285

¹⁶ "6.25 전쟁 초기 김일성의 전술적 실패와 오류", *Dailynk.Com*, last modified 2017, accessed January 31, 2017, <http://www.dailynk.com/korean/read.php?cataId=nk07008&num=104186>.

¹⁷ "6.25 전쟁 전개과정", *Kin.Naver.Com*, last modified 2013, accessed February 24, 2017, http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=11&dirId=111001&docId=255231784&qb=Ni4yNSDsoITsn4E=&enc=utf8§ion=kin&rank=1&search_sort=0&spq=0&pid=TLEapwpySD8ssb8LfNhssssPd-118744&sid=2WfcBuNO0y3rRPSR1gUd8g%3D%3D.

¹⁸ "한국 휴전 협정", *Terms.Naver.Com*, last modified 2009, accessed October 22, 2016, <http://terms.naver.com/entrv.nhn?docId=928987&cid=43667&categoryId=43667>.

terjadi antar kedua belah pihak. Tetapi setelah gencatan senjata, kedua Korea lebih memperhatikan stabilitas sistem negara masing-masing daripada unifikasi. Presiden Syngman Rhee dari Korea Selatan menandatangani "*Mutual Defense Treaty*" di antara Korea Selatan dan Amerika Serikat pada tahun 1953 untuk mendapatkan bantuan jika menghadapi serangan dan mewajibkan pendidikan dasar sehingga menurunkan angka buta huruf. Sebelumnya hanya 14% dari seluruh warga Korea mendapatkan pendidikan dan angka kebutuhurufan lebih dari 80%. Presiden Syngman Rhee meyakini bahwa pendidikan diperlukan untuk mencapai demokrasi. Semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Setidaknya pendidikan dasar merupakan hal yang wajib dan bebas biaya itu tercantum dalam Konstitusi Pasal 16. Pada masa pemerintahan Syngman Rhee, Korea Selatan mengalami keterpurukan terburuk dalam sejarah Republik Korea. Tetapi kemudian, Korea Selatan berinvestasi lebih dari 10% dari anggaran pemerintah untuk pendidikan sehingga banyak sekolah yang didirikan. Akibatnya ini menjadi pondasi Korea Selatan untuk berkembang sangat cepat, baik secara ekonomi maupun secara politik di masa depan. Selama periode ini, Korea Selatan telah menerima bantuan ekonomi dari Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya untuk mengembangkannya dan sudah meraih tingkat pertumbuhan 5.5% pada pertengahan tahun 1950. Pada saat yang sama, Korea Utara yang dijalankan oleh Kim Il-sung dengan prinsip berdikari, berusaha hidup tanpa bantuan negara lain, namun kenyataan di lapangan lebih pahit karena pertumbuhan ekonomi yang lemah, sementara lahan pertanian sangat terbatas. Pemimpin Kim Il-sung memulai kampanye Chollima yang menempatkan pertanian

dan perindustrian di bawah pengelolaan pemerintah untuk memperkuat dukungan kekuasaannya. Dengan kampanye Chollima, Ia berhasil menanamkan ideologi *Juche*¹⁹ kepada setiap individu dari kecil sehingga loyalitas mereka terhadap ideologi ini sangat besar.²⁰ Korea Selatan mengalami pertumbuhan secara ekonomi tetapi masih mengalami banyak kesulitan secara politik domestik.²¹ Namun di bawah kepemimpinan Syngman Rhee, kondisi di Korea Selatan saat itu bisa dibidang jauh dari demokrasi. Syngman Rhee terpilih kembali pada 1952, 1956, dan 1960 dengan kemenangan telak, 90 persen jumlah pemungutan suara.²² Sebagai presiden, dia berkuasa secara diktator. Dan membubarkan Majelis Nasional. Kecurangan nyata pemilu pada 1960 memicu demonstrasi mahasiswa sehingga mengakibatkan banyak korban berjatuh. Pada tanggal 19 April 1960, lebih dari 100,000 mahasiswa turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi di ibukota Seoul sebagai bentuk protes terhadap upaya presiden Syngman Rhee yang tetap mempertahankan kedudukan. Ia telah memperpanjang masa kepemimpinannya dua kali melalui amendemen konstitusional tahun 1952 dan 1954. Mahasiswa menuntut agar hasil pemilu tersebut dibatalkan. Dalam Revolusi April, 184 orang tewas dan 6000 terluka karena bentrokan dengan polisi. Pada tanggal 25 April 1960, Syngman Rhee merupakan Presiden Korea Selatan pertama yang dipaksa keluar dari kantor setelah Gerakan April 19. Revolusi ini

¹⁹ Ideologi Juche adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari tiap individu di Korea Utara untuk bertanggung jawab terhadap pergerakan dari negaranya sendiri. Ideologi ini mengandung prinsip bahwa "manusia menguasai segala sesuatu dan memutuskan segala sesuatu".

²⁰ Alzo David-West, "“MAN IS THE MASTER OF EVERYTHING AND DECIDES EVERYTHING”: DE-CONSTRUCTING THE NORTH KOREAN JUCHE AXIOM", *Essays in the Philosophy of Humanism* 17, no. 2 (2013): 67-84, accessed January 30, 2017, https://www.ekoreajournal.net/issue/view_pop.htm?Idx=3206.

²¹ Dinamika Korea Dan Persoalan Politik Di Sekitarnya, 1st ed. (Yogyakarta: INAKOS, 2010). hal 21

²² Runtuhnya SANG PENGUASA. 1st ed. (Jakarta: Raih Asa Sukses. 2012). hal 216 - 218

merupakan hasil dari perjuangan hak asasi manusia rakyat Korea yang pertama dalam sejarah Korea dan juga sebagai bentuk perjuangan demokrasi rakyatnya. Setelah runtuhnya rezim Syngman Rhee, Chunghee Park merebut kekuasaan melalui kudeta militer pada tahun 1961. Kudeta militer yang dilakukan oleh Chunghee Parkpun berhasil dan iapun naik menjadi presiden baru Korea Selatan pada tahun 1963. Ketika ia berkuasa pada tahun 1961, Korea Selatan adalah salah satu negara paling miskin di dunia dengan pendapatan per kapita Korea Selatan yang hanya mencapai US \$ 72. Namun, Korea Utara pada saat itu mempunyai kekuatan ekonomi dan militer yang lebih besar dibanding dengan Korea Selatan. Tidak lama setelah kudeta, Chunghee Park melakukan banyak reformasi penting. Dari tahun 1962, Korea Selatan melaksanakan rencana ekonomi dengan meminjam dana dari negara lain karena minimnya sumberdaya alam Korea. Dana tersebut dilakukan untuk memproduksi barang dengan menggunakan mesin dan material impor untuk kemudian diekspor dan transfer teknologi dengan menyekolahkan pemuda-pemuda Korea Selatan ke negara maju untuk kemudian dikembangkan di Korea Selatan. Dalam periode ini, berbagai sarana industri dibangun dan pemerintah membuat kebijakan yang mempermudah masuknya investasi asing. Industri Korea Selatan melihat perkembangan yang luar biasa di bawah kepemimpinan Chunghee Park. Pertumbuhan ekonomi yang cukup besar ini disebabkan oleh adanya industri tahap kedua dan ketiga yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemajuan perekonomian Korea Selatan yang di gagas oleh Presiden Chunghee Park ini terkenal dengan sebutan 'Keajaiban Sungai Han'. Korea Utara kemudian merasa terancam oleh pertumbuhan ekonomi

yang pesat di Korea Selatan. Korea Utara mencoba beberapa upaya pembunuhan terhadap pemimpin Korea Selatan, dengan upaya yang paling dikenal pada 1968, 1974, dan pengeboman Rangoon pada 1983. Antara tahun 1966 dan 1969, bentrokan meningkat dengan aksi tembak-menembak sepanjang Korea DMZ. Pertempuran ini, kadang-kadang disebut sebagai 'Perang Korea Kedua'. Meskipun bermusuhan, negosiasi dilakukan antara Korea Utara dan Selatan mengenai reunifikasi. Pada 4 Juli 1972, kedua negara mengeluarkan pernyataan bersama untuk pertama kali, dalam menentukan reunifikasi yang harus dicapai. Kedua Korea mencapai kesepakatan pada 3 prinsip untuk reunifikasi. Yaitu, kemerdekaan, unifikasi damai dan kesatuan nasional yang besar.²³ Pada tahun 1979, Presiden Park Chung-hee terbunuh oleh Jaegyu Kim, seorang kepala jasa keamanan karena dikatakan sebagai penghalang demokrasi. Kemudian pemerintahan rezim beralih ke tangan jenderal bernama Doohwan Chun. Naiknya Doohwan Chun diikuti ketidakpuasan masyarakat yang menginginkan transisi yang demokratis. Para mahasiswa yang menginginkan adanya demokratisasi penuh dalam negaranya, melakukan demonstrasi besar.²⁴ Awal periode ini diwarnai dengan peristiwa Pergerakan Demokratisasi Mei yang terjadi di kota Gwangju. Pada 18 Mei 1980, sekitar 100 orang mahasiswa di kota Gwangju mulai demonstrasi dengan slogan "berambus tentara". Keesokan harinya, lebih dari 300,000 rakyat telah ikut serta dalam demonstrasi dan menentang kekuasaan

²³ Jongdae Shin, "DPRK Perspectives On Korean Reunification After The July 4Th Joint Communiqué", *Wilson Center*, last modified 2012, accessed March 30, 2017, <https://www.wilsoncenter.org/publication/dprk-perspectives-korean-reunification-after-the-july-4th-joint-communicue>.

²⁴ A. Jafar M. Sidik Sidik, "Antara Chun Doo Hwan, Augusto Pinochet, Dan Soeharto - ANTARA News", *Antaraneews.Com*, last modified 2008, accessed February 25, 2017, <http://www.antaraneews.com/berita/90630/antara-chun-doo-hwan-augusto-pinochet-dan-soeharto>.

Jenderal Doohwan Chun. Hampir semua jalan keluar masuk ke Gwangju telah ditutup oleh pihak tentara pemerintah.²⁵ Pada 27 Mei 1980, Diktator Doohwan Chun telah menghantar unit khas dari 5 divisi tentara untuk merempuh masuk ke bandar Gwangju dan melakukan pembunuhan massal. Saat itu pemerintahan diktator Doohwan Chun mengatakan bahwa pemberontakan yang berlaku di Gwangju merupakan pemberontakan Komunis. Tetapi setelah rakyat Korea Selatan menamatkan pemerintahan diktator pada 1987, "Kebangkitan Gwangju 18 Mei" telah mendapat pengakuan sebagai gerakan demokrasi melawan pemerintah diktator dan usaha untuk menempatkan sistem demokrasi di Korea Selatan. Selama masa kepemimpinan Chun, perjuangan menuntut demokrasi mencapai kemenangan. Kemenangan ini telah menghentikan pemerintahan diktator yang dipimpin oleh Doohwan Chun sehingga Doohwan Chun memperbolehkan partai-partai politik kembali beroperasi dan mengubah sistem pemilihan umum presiden sehingga sampai saat ini presiden dipilih langsung oleh rakyat.²⁶ Pada saat itu, seperti sistem politik menjadi matang, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan juga sangat berhasil. Hasilnya Korea Selatan dinobatkan sebagai negara industri baru dunia (NICs) bersama dengan Singapura, Hongkong dan Taiwan.²⁷ Warisan terbaik dari masa jabatan Doohwan Chun adalah diperolehnya demokrasi lewat sistem pemilihan presiden secara langsung. Pada bulan Desember tahun itu, pemilihan presiden ke 13 diadakan menurut konstitusi yang telah direvisi. Banyak

²⁵ 김정환, "A Subjectivity Of The Civil Militia In The 5·18 Gwangju Uprising", *사회과학연구* 18, no. 1 (2010): 120-148.

²⁶ John Kie-Chiang oh, "Korean Politics: the Quest for Democratization and Economic Development", (Newyork, Cornell University Press, 1999). halaman 41

²⁷ Tun-jen Cheng, "The Rise And Limits Of The East Asian Nics", *Pacific Focus* 2, no. 2 (2008): 51-75.

orang yang bercita-cita terhadap buah politik demokratis sangat kecewa ketika Youngsam Kim dan Daejung Kim akhirnya maju sebagai calon yang bersaing, membagi suara kekuatan demokratis. Hal ini mengakibatkan kemenangan bagi Taewoo Roh. Dia adalah seorang politisi yang memiliki latar belakang militer dan berasal dari partai yang sama dengan Doohwan Chun. Taewoo Roh terpilih sebagai presiden baru Korea Selatan pada tahun 1988. Selama masa jabatannya, Presiden Taewoo Roh berhasil menjadi tuan rumah olimpiade Seoul pada tahun 1988, berkomitmen untuk reformasi demokratis dan membahas pembicaraan unifikasi untuk mengakhiri permusuhan dengan Korea Utara. Selain itu, Presiden Taewoo Roh menurunkan tingkat pengangguran dan melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dengan membangun *Saemangeum Seawall Project*, Bandara Internasional Incheon, *West Coast Highway* dan *KTX(Korea Train eXpress)*. Pemerintahan Taewoo Roh telah membuat kebijakan luar negeri baru untuk membangun hubungan antar-Korea yang berbeda dengan masa lalu. Upaya tersebut diwujudkan dalam deklarasi 7 Juli pada tahun 1988 dan kebijakan unifikasi masyarakat Korea pada tahun 1989. Di dalam deklarasi 7 Juli, Korea Selatan menganggap Korea Utara sebagai mitra dan bukan sebagai oposisi atau musuh dan memberikan arahan untuk mencapai unifikasi dengan damai.²⁸ Setelah selesai masa jabatan Taewoo Roh, Youngsam Kim menjadi presiden pada tahun 1992 dan menjabat di periode 1993-1998. Dia menjadi presiden pertama dari sipil sekaligus mengakhiri masa kepemimpinan militer di negara Korea Selatan selama

²⁸ "대북정책에 대해 알려주세요~", *Kin.Naver.Com*, last modified 2013, accessed January 28, 2017, http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=6&dirId=60601&docId=177794308&qb=64W47YOc7JqwIOuMgOu2geyglyxhQ==&enc=utf8§ion=kin&rank=2&search_sort=0&spq=0&pid=TLH6ClbvSDwssZLMMzRssssskK-114339&sid=GBrkg9gUCNVK9PkEflT/TA%3D%3D.

tiga dekade.²⁹ Semasa kepemimpinannya, Youngsam Kim dikenal dengan meluncurkan kampanye anti korupsi besar-besaran yang mengakibatkan penangkapan dua orang pendahulunya. Gerakannya itu sempat melambung hingga akhirnya jatuh setelah anaknya ditangkap atas tuduhan penyuapan dan penggelapan pajak. Akhir masa kepemimpinannya ditutup oleh krisis keuangan Asia. Korea Selatan terbebani utang luar negeri dan berpuncak pada *bail out* terbesar dari International Monetary Fund (IMF). Presiden Youngsam Kim mencoba untuk melanjutkan dan memperluas kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara dari presiden sebelumnya, tetapi upaya tersebut gagal karena Kim Il-sung dari Korea Utara meninggal pada tahun 1993 dan terjadi penarikan *Non-Proliferation Treaty (NPT)* Korea Utara pada tahun yang sama.³⁰ Pada tahun 1994, kematian Kim Il-Sung membawa Kim Jong-Il untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin baru Korea Utara.

Kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara dapat dibedakan pada masa sebelum Presiden Daejung Kim dan sesudahnya dengan jelas. Ketika Presiden Daejung Kim mulai berkuasa pada tahun 1998, ia mengumumkan '*Sunshine Policy*', sebuah kebijakan yang bertujuan meningkatkan interaksi antara kedua negara. *Sunshine Policy* digulirkan dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan rezim Pyongyang bahwa Seoul mempunyai keinginan untuk mengadakan pendekatan melalui kerjasama dan pertukaran kunjungan antara dua

²⁹ "Mantan Presiden Korea Selatan Kim Young-Sam Meninggal Dunia", *Detiknews*, last modified 2015, accessed March 20, 2017, <https://news.detik.com/internasional/d-3077233/mantan-presiden-korea-selatan-kim-young-sam-meninggal-dunia>.

³⁰ "North Korea's Npt Withdrawal", *Newsis*, last modified 2016, accessed March 17, 2017, http://www.newsis.com/ar_detail/view.html/?ar_id=NISX20160909_0014377972&cID=10301&pID=10300.

negara. Di bawah kebijakan *Sunshine Policy* milik DaeJung Kim, Korea Selatan membantu tanpa syarat kelangkaan pangan di Korea Utara karena keprihatian kemanusiaan. Di masa pemerintahan Daejung Kim, sebuah langkah penting untuk hubungan kedua negara bersaudara ini terlaksana, yaitu terselenggaranya Konferensi Tingkat Tinggi Inter Korea di tahun 2000. Sebuah babak baru dari hubungan kedua negara yang terpisah oleh ideologi yang berbeda ini telah dimulai. Di dalam konferensi ini, Presiden Korea Selatan menandatangani perjanjian "*15th North-South Joint Declaration*"³¹ yang mencantumkan bahwa Korea Selatan akan memberikan bantuan ekonomi kepada Korea Utara dan akan saling melakukan kunjungan antar pemimpin masing-masing Korea. Dengan adanya perjanjian tersebut, Korea Utara mulai membuka diri dengan kebijakan yang membolehkan puluhan keluarga Korea Utara untuk mengunjungi saudaranya yang terpisah di Korea Selatan. Dan sebaliknya yang terpisah akibat Perang Korea, diperbolehkan untuk melewati jalur khusus untuk rel kereta dan sambungan kabel telepon yang menghubungkan Seoul-Pyongyang.³² Sebagai hasil dari pertemuan ini, pada olimpiade Sydney 2000 sampai Athena 2004 masyarakat internasional dikejutkan dengan munculnya kontingen dari Korea bersatu yang berisikan para atlet dari kedua Korea tersebut. Di masa pemerintahan ini, kebijakan politik luar negeri terhadap Korea Utara cukup kooperatif dan dengan pendekatan yang lebih persuasif. '*Sunshine Policy*' mendapatkan ujian pertama pada bulan Oktober 2002 ketika AS mengumumkan Korea Utara telah kembali memulai program rahasia

³¹ "Kim Dae-Jung", *Nytimes.Com*, last modified 2009, accessed March 9, 2017, <https://www.nytimes.com/topic/person/kim-daejung>.

³² *The Politics Of Food Aid In North Korea : The Cause Of Famine In North Korea And The Politics Of Food Aid*, 1st ed. (Chicaco: University Of Oslo, 2006). hal 210-241

senjata nuklir. Hal itu menyusul ketegangan antara AS dan Korea Selatan dengan Korea Utara.³³

Moohyun Roh terpilih sebagai presiden baru Korea Selatan di periode 2003-2008. Presiden Moohyun Roh mencoba meningkatkan daya saing perdagangan dengan cara menandatangani FTA(Free Trade Agreement). Pada pemerintahan Moohyun Roh, Kimoon Ban dilantik sebagai Sekretaris Jenderal PBB. Sekretaris Jenderal PBB Kimoon Ban adalah orang Korea Selatan yang pertama kali mencalonkan diri untuk menjadi Sekretaris Jenderal PBB.³⁴ Selain itu, dalam pidato pelantikan Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun tanggal 25 Februari 2003, dia berjanji akan membangun Korea Selatan menjadi 'pusat Asia Timur Laut', untuk meningkatkan hubungan antar Korea dan memimpin Korea Selatan menuju 'era perdamaian dan kemakmuran'. Lalu kondisi yang semakin mambaik dan proses demokratisasi yang berjalan lancar membuat hak asasi manusia dari rakyat Korea Selatan dihormati dan diperhatikan oleh pemerintah yang berkuasa di Korea Selatan. Pertemuan Tingkat Tinggi antar Korea kembali diselenggarakan pada tanggal 2-4 Oktober 2007 di Pyongyang.³⁵ Kedua kepala negara mendiskusikan tentang kemajuan hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan, perdamaian di Semenanjung Korea, kesejahteraan rakyat Korea dan penyatuan Korea. Di masa pemerintahan Moohyun Roh usaha untuk mendekati

³³ Dong Hyung Lee, "The Korean Sunshine Policy: Its Light And Shade", *Pacific Focus* 18, no. 1 (2008): 175-200.

³⁴ Donghyun Kim, "Roh Moohyun's Foreign Policy", *Ohmynews*, last modified 2014, accessed February 17, 2017, http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002017792.

³⁵ Sungwoo Park, "[노무현 전 대통령 대북 정책 평가 Q/A]", *Radio Free Asia*, last modified 2009, accessed January 25, 2017, http://www.rfa.org/korean/in_focus/roh_nk_policy-05282009114930.html.

Korea Utara dengan cara-cara yang lebih lunak terus diupayakan. Sunshine Policy yang terus didengungkan di masa Daejung Kim semakin diperbaharui dan disempurnakan dengan nama "Perdamaian dan kesejahteraan."

Menyusul ketegangan yang terus terjadi antara dua negara, Korea Utara terus melakukan uji coba nuklir, dan peluncuran artileri yang menyebabkan kematian dua warga sipil dan dua anggota militer Korea Selatan. Semenjak Myungbak Lee terpilih menjadi presiden Korea Selatan pada tahun 2008, kebijakan *Sunshine Policy* dianggap hanya menghamburkan uang negara sehingga pada November 2010, Kementrian Penyatuan Korea Selatan secara resmi menyatakan bahwa '*Sunshine Policy*' gagal, dan membawa kepada berakhirnya kebijakan tersebut.³⁶ Adanya perubahan tersebut membuat Korea Utara yang sangat bergantung kepada tetangganya tersebut, kelabakan dan Pyongyangpun melakukan manuver sehingga munculnya insiden tenggelamnya kapal perang Cheonan milik angkatan laut Korea Selatan dan pengeboman ke pulau Yeongpyeong.³⁷ Pada tanggal 17 Desember 2011, Kim Jongil meninggal setelah menderita serangan jantung, dan putranya, Kim Jongun, diumumkan sebagai pengganti. Kim Jongun menjadi orang nomor satu di Korea Utara menggantikan peran ayahnya. Hal ini mengancam stabilitas hubungan antar Korea yang telah terbangun dikarenakan usia dan pengalaman Kim Jongun yang masih belum mumpuni.³⁸ Ketidakpercayaan tersebut tidak hanya berasal dari Korea Selatan, tetapi juga dari jajaran pejabat Pyongyang termasuk pihak militer yang meragukan

³⁶ Anne E Sartori, *Deterrence By Diplomacy*, 1st ed. (Princeton: Princeton University Press, 2013). hal 166-168

³⁷ Se-hyön Chöng, *Chöng Se-Hyön Ŭi Oegyo T'ok'ü*, 1st ed. (Seoul: booksea, 2016). hal 166

³⁸ Ibid. hal 120

kemampuan pemimpin barunya yang menyandang predikat '*Enlightment Leader*'. Tanggal 1 Januari 2013, Kim Jongun menyampaikan pesan tahun baru melalui siaran televisi, menyerukan untuk membina hubungan yang lebih baik dengan Korea Selatan. Tapi pada bulan Februari 2013, Korea Utara melakukan uji coba nuklir ketiga, yang dapat dikatakan dua kali lebih besar dampaknya dibandingkan uji coba pada tahun 2009.³⁹ Pada April 2013, Korea Utara mengatakan bahwa mereka akan memulai fasilitas nuklir utamanya di Yongbyon untuk meningkatkan kekuatan nuklir Korea Utara secara kualitas maupun kuantitas. Uji coba ini meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea. Beberapa sanksi baru diberlakukan oleh PBB terhadap Korea Utara, terkait uji coba nuklir dan peluncuran roket jarak jauh. Dengan ancaman tersebut, latihan militer yang dikenal dengan sebutan *Key Resolve* dan *Foal Eagle* dilaksanakan dengan melibatkan 17 ribu tentara Amerika Serikat yang empat kali lebih banyak daripada yang berpartisipasi tahun lalu dan 300 ribu tentara Korea Selatan.⁴⁰ Uji coba nuklir dan peluncuran roket Korea Utara baru-baru ini telah memicu reaksi yang berpotensi meningkatkan konflik antara kedua negara Korea itu.

Pada tahun 2013, Geunhye Park terpilih menjadi Presiden Korea Selatan. Meningkatnya intensitas konflik antar Korea membuat Geunhye Park meluncurkan kebijakan *Trust politic* yang mengfokuskan perbaikan hubungan antar Korea berdasar pada kepercayaan dan menghilangkan kebijakan yang keras

³⁹ Ibid. hal 18

⁴⁰ "Key Resolve: United States And South Korea Hold Joint Military Exercise, As Usual", *Public Radio International*, last modified 2013, accessed February 1, 2017, <https://www.pri.org/stories/2013-03-11/key-resolve-united-states-and-south-korea-hold-joint-military-exercise-usual>.

dari pemerintah sebelumnya. Namun uji coba nuklir Korea Utara yang ketiga mempengaruhi rencana itu. Presiden Geunhye Park mendesak Korea Utara untuk menghentikan ambisi nuklirnya⁴¹ sehingga pemerintah Seoul menutup kompleks industri Kaesong yang dioperasikannya bersama dengan Pyongyang. Kemudian Korea Utara segera memulangkan seluruh warga Korea Selatan yang bekerja di Kaesong dan memutus hubungan komunikasi darurat langsung yang dipasang untuk meredam situasi-situasi militer berbahaya. Ketidakadaan saluran komunikasi langsung membuat kesiagaan Pasukan Amerika Serikat dan Korea Selatan meningkat. Maka dari itu, setiap provokasi yang dilakukan Korea Utara juga meningkat dengan cepat. Korea Utara membuat banyak konflik dengan negara tetangganya, hal ini menjadi salah satu bukti bahwa kunci reunifikasi dengan Korea Selatan bergantung pada Korea Utara. Karena sampai sekarang walaupun Presiden Korea Selatan Geunhye Park telah melakukan upaya persuasif dengan mengajak kembali Korea Utara untuk berdialog, tetapi Korea Utara masih belum memberi jawaban atas permintaan dari Korea Selatan.

1.2 Identifikasi Masalah

Korea Selatan telah berjalan di dalam realitas perpecahan selama setengah abad terakhir dari tahun 1950 sampai sekarang. Kenyataan ini mempengaruhi tidak hanya isu-isu domestik, tetapi isu-isu ekonomi, militer dan diplomatik. Konflik dengan Korea Utara adalah isu yang paling penting pada

⁴¹ "Korea Utara Dan Krisis Ekonomi Jadi Tantangan Park", *Tempo News*, last modified 2013, accessed March 1, 2017, <https://m.tempoco/read/news/2013/02/25/118463558/korea-utara-dan-krisis-ekonomi-jadi-tantangan-park>.

setiap pergantian rezim di Korea Selatan. Karena kondisi geografis Korea Utara yang merupakan tetangga dekat Korea Selatan. Maka dari itu setiap permasalahan yang ada mempengaruhi geopolitik kedua negara. Korea utara merupakan lawan dalam persetujuan militer dan subyek penyatuan yang tidak dapat diremehkan untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran. Kebijakan atau pandangan terhadap Korea Utara di setiap pemerintah Korea Selatan selalu berubah karena sesuai dengan situasi pada saat itu. Tujuan utama dari suatu negara adalah keamanan negara sendiri dan membuka diri terhadap unifikasi. Namun, kebijakan Korea Utara bisa cepat berubah secara strategis di bawah situasi internasional yang tidak stabil. Khususnya pada saat Korea Selatan dipimpin oleh Presiden Daejung Kim, hubungan antar dua Korea mengalami banyak perubahan dan setelah 10 tahun pengupayaan untuk reunifikasi di bawah Presiden Daejung Kim dan Presiden Moohyun Roh, perdamaian di antara dua negara tetap tidak mudah didapatkan. Presiden Myeongbak Lee yang menggantikan kedudukan kedua presiden sebelumnya, telah mengubah banyak kebijakan terhadap Korea Utara secara signifikan untuk membangun hubungan baru antar kedua negara.

Hubungan antar-Korea mulai membaik melalui *Sunshine Policy* yang dipelopori oleh Presiden Korea Selatan, Daejung Kim pada tahun 1998.⁴² *Sunshine Policy* merupakan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara yang mengedepankan pendekatan secara damai dengan menjalin kerjasama

⁴² Geunsik Kim, "김대중 정부의 햇볕정책 : 회고와 전망", *Academic.Naver.Com*, last modified 2002, accessed February 4, 2017, http://academic.naver.com/view.nhn?doc_id=11101144&dir_id=0&field=0&unFold=false&gk_ad t=0&sort=0&qvt=1&query=햇볕정책&gk_qvt=0&citedSearch=false&page.page=1&ndsCategoryI d=10302&librarv=185.

di bidang ekonomi dan kemanusiaan serta memajukan rekonsiliasi dalam mewujudkan reunifikasi. Melalui sebuah kebijakan yang terkenal dengan nama *Sunshine Policy*, Korea Selatan melakukan pendekatan secara tidak langsung dengan Korea Utara dalam proses menuju reunifikasi. Tujuan utama kebijakan Korea Selatan ini adalah untuk melunakan sikap Korea Utara dengan cara interaksi dan bantuan ekonomi. Kebijakan ini menyampaikan pesan bahwa Korea Selatan tidak ingin menyerap Korea Utara atau untuk melemahkan pemerintahannya, tetapi tujuannya adalah koeksistensi perdamaian. Keberhasilan *Sunshine Policy* terhadap Korea Utara disambut baik dan telah menghasilkan peningkatan hubungan kedua negara Korea.

Keharmonisan Korea Utara dan Korea Selatan tersebut hanya berlangsung sebentar. Setelah presiden Korea Selatan Daejung Kim turun tahta dan digantikan oleh Presiden Moohyun Roh, hubungan kedua Korea menjadi renggang. Pada masa Moohyun Roh haluan kebijakan Korea Selatan untuk Korea Utara berubah. Hal ini dibuktikan bahwa *Sunshine Policy* tidak lagi didukung semua pihak karena banyak rakyat Korea yang menganggap kebijakan tersebut hanya sebagai '*mission impossible*' Presiden Daejung Kim.⁴³ *Sunshine Policy* digantikan oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan pada masa Presiden Moohyun Roh. Presiden Moohyun Roh mengadopsi kebijakan kesejahteraan dan hubungan Korea Selatan terhadap Korea Utara serta akan terus berupaya untuk menuju reunifikasi kedua Korea di abad ke-21. Presiden Moohyun Roh juga tidak

⁴³ "Sunshine Policy Failed To Change North Korea: Report", *Reuters*, last modified 2010, accessed February 4, 2017, <http://www.reuters.com/article/us-korea-north-sunshine-idUSTRE6AH12520101118>.

menyerah untuk menyatukan kedua Korea, namun usaha yang dilakukan, seperti beberapa perundingan dua Korea, mengalami kegagalan. Meskipun Presiden Moohyun Roh tidak secara langsung mewarisi *Sunshine Policy*, namun ia mengeluarkan kebijakan yang serupa dan melanjutkan *Sunshine Policy*.

Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan semakin memburuk sejak terpilihnya Myungbak Lee sebagai presiden baru Korea Selatan yang dilantik pada tahun 2008. Presiden Myungbak Lee memiliki pemikiran yang bertolak belakang dari pemimpin sebelumnya. Myungbak Lee menghentikan bantuan kepada Korea Utara dan mencanangkan kebijakan yang lebih provokatif dan mengancam Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya. Korea Utara merespon sikap provokatif Korea Selatan dengan mengancam Korea Selatan melalui rudal nuklir dan ancaman akan penyerangan terhadap Korea Selatan. Kegagalan upaya reunifikasi tersebut semakin memuncak hingga adanya keputusan Korea Utara membatalkan upaya reunifikasi dengan Korea Selatan.

Walaupun berbagai usaha telah dilakukan oleh Korea Selatan untuk menciptakan perdamaian dan reunifikasi antara kedua Korea, namun Korea Utara tetap melakukan banyak kekerasan terhadap Korea Selatan seperti Cheonan tenggelam, battle of Yeonpyeong dan penembakan Yeonpyeong.⁴⁴ Secara khusus, pengembangan nuklir selalu menjadi hambatan dalam dialog antar kedua negara. Karena itu, penulis tertarik untuk menulis penelitian tentang kebijakan dan strategi Korea Selatan terhadap Korea Utara.

⁴⁴이 상신, "Trust In Government In South Korea: Cheonan Ship Incident And Trust", *Korean Political Science Review* 44, no. 4 (2010): 97-117.

1.2.1 Perumusan Masalah

Dari apa yang sudah diuraikan di bagian latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka perumusan masalah (pertanyaan riset) untuk penelitian tesis ini adalah : "Bagaimana dinamika perubahan kebijakan Korea Selatan ke Korea Utara pada periode pemerintahan Daejung Kim, Moohyun Roh dan Myeongbak Lee? Dan bagaimana dampaknya terhadap rencana reunifikasi dua Korea?"

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk penelitian skripsi ini, penulis hanya akan membatasi permasalahan mulai dari masa jabatan presiden Korea Selatan Selatan Daejung Kim (1998-2003) sampai Myeongbak Lee (2008-2013). Sejak terpilihnya presiden Daejung Kim, kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara berubah drastis. Kebijakan yang bersifat kooperatif dilaksanakan selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Daejung Kim(1998-2003) dan Moohyun Roh(2003-2008), yang sebelumnya tidak ada. Tetapi dengan krisis nuklir yang terjadi di Semenanjung Korea, warga Korea Selatan memilih Myungbak Lee yang berasal dari kelompok politik yang berbeda dari sebelumnya sebagai presiden baru. Presiden Myeongbak Lee yang menggantikan kedudukan kedua presiden sebelumnya, telah mengubah banyak kebijakan terhadap Korea Utara secara signifikan untuk membangun hubungan baru antar kedua negara. Oleh karena itu,

penulis membatasi masa jabatan kepresidenan Korea Selatan Selatan Daejung Kim (1998-2003) sampai Myeongbak Lee (2008-2013) untuk melihat dinamika perubahan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara dan dampak reunifikasi dari kepemimpinan tersebut.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak dari kebijakan dan strategi terhadap Korea Utara dari pemerintah Korea Selatan dari masa jabatan presiden Korea Selatan Daejung Kim sampai Myeongbak Lee. Dan untuk menanyakan juga apakah kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi tersebut mengarah ke reunifikasi atau tidak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada para mahasiswa, para peneliti dan pihak-pihak lainnya yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kawasan Asia Timur dan semenanjung Korea.

1.4 Kerangka Pemikiran

Pada bagian kerangka penelitian, penulis akan mencoba menjabarkan *two level game theory* yang relevan dengan fenomena penelitian yang akan diteliti. Teori ini akan digunakan oleh penulis sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang muncul untuk menyempurnakan skripsi ini. Kerangka pemikiran ini akan menjadi acuan dalam penyelesaian masalah pada penelitian ini.

Pada dasarnya, studi hubungan internasional merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antar aktor yang ada. Dengan adanya perkembangan telekomunikasi dan transportasi, globalisasi semakin meningkat dan hubungan internasional juga semakin penting. Secara khusus pengaruh aktor domestik ditingkatkan dalam hubungan internasional oleh penyebaran nilai demokrasi.⁴⁵ Karena pengaruh aktor-aktor domestik meningkat, analisa tentang hubungan internasional hanya dengan faktor sistem internasional sangat sulit dan tidak tepat.⁴⁶ Karena politik dalam negeri dan hubungan internasional seringkali memiliki keterkaitan satu sama lain. Kebijakan luar negeri dari suatu negara yang menentukan hubungan internasional, tidak ditentukan oleh pemerintah sendiri. Kebijakan luar negeri itu adalah hasil dari kompetisi dan negosiasi antara pemerintah dan berbagai aktor-aktor domestik untuk mengejar kepentingan mereka sendiri.⁴⁷ Dan tekanan internasional juga merupakan suatu kondisi yang diperlukan untuk adanya pergeseran kebijakan. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan teori *two level game* yang dikemukakan oleh Robert Putnam. Teori *two level game* dapat menjelaskan tentang interaksi di antara pengaruh aktor-aktor domestik seperti parlemen, LSM dan/atau kelompok-kelompok domestik dan faktor internasional seperti sistem internasional dan/atau pembagian kekuatan dunia.

Berdasarkan teori tersebut, seorang pengambil keputusan (kepala pemerintah atau negara) harus mampu menjalankan dua perdamaian, yakni

⁴⁵ Kwan-ok Kim, *Kaltūng Kwa Hyōmnyōk Ūi Tong Asia Wa Yangmyōn Keim Iron*, 1st ed. (Sōul-si: Libuk, 2010). hal 24.

⁴⁶ *ibid.* hal 41

⁴⁷ *ibid.* hal 44

domestik dan internasional dan memenangkan keduanya. Putnam memfokuskan pada interaksi yang terjadi antara dua medan permainan, khususnya dalam proses ratifikasi. Pada tingkat nasional, kelompok-kelompok dalam negeri mengejar kepentingan mereka dengan menekan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang menguntungkan mereka, dan politisi mencari kekuasaan dengan membangun koalisi dengan kelompok tersebut. Pada tingkat internasional, pemerintah nasional berusaha untuk memaksimalkan kemampuan mereka sendiri untuk meminimalkan konsekuensi yang merugikan pembangunan luar negeri dan memenuhi tekanan-tekanan domestik. Karena tanpa resonansi domestik, tekanan internasional tidak akan mencukupi untuk menghasilkan kesepakatan. Konsep ini dikembangkan menjadi konsep baru yakni Win-set. Win-set adalah tingkat kesepakatan atau persetujuan di level kedua(level domestik) bagi suksesnya negosiasi di level pertama(level internasional). Artinya, semakin besar kesepakatan domestik, berarti semakin besar win-set dan semakin besar pula perundingan di level pertama dalam mencapai keberhasilan. Sebaliknya semakin kecil win-set, maka akan semakin besar juga risiko negosiasi yang akan rusak. Ada 3 faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi win-set. Pertama, ukuran dari win-set bergantung pada distribusi kekuasaan, preferensi, dan koalisi yang memungkinkan antara komponen-komponen dalam tingkat domestik atau level kedua. Kedua, ukuran dari win-set bergantung pada lembaga politik di tingkat domestik atau level kedua. Terakhir, ukuran dari win-set bergantung pada berbagai strategi negosiator di tingkat internasional atau level pertama. Berdasarkan pengertian ini, penulis akan memulai skripsi ini.

1.5 Kajian Pustaka

Pada bagian kajian pustaka ini, penulis akan menjelaskan beberapa literatur yang penulis ambil sebagai bantuan untuk menyelesaikan penelitian ini. Ketiga buah literatur ini memiliki hubungan yang erat dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Namun bukan berarti didalam literatur tersebut terdapat jawaban mutlak akan apa yang penulis teliti.

1.5.1 *China Push, US Endure* (중국의 밀어내기 미국의 버티기)

Perang Korea yang terjadi di Semenanjung Korea adalah perang pertama yang Amerika Serikat dan Cina saling berhadapan secara langsung. Karena posisi geopolitik Semenanjung Korea merupakan lokasi strategis yang sangat penting bagi pasukan maritim, Amerika Serikat, dan pasukan daratan, Cina bukan hanya pada masa lalu tetapi pada saat ini juga. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Korea, terutama kebijakan terhadap Korea Utara yang mendapatkan banyak pengaruh dari Cina dan Amerika Serikat. Dengan alasan ini, Literatur pertama yang penulis ambil adalah “China Push, US Endure”. Disertasi ini membahas mengenai G2, Cina dan US. Literatur ini terdiri dari 8 bagian. Di bagian pertama, menjelaskan tentang kepentingan posisi geopolitik Semenanjung Korea. Dan bagian selanjutnya menganalisa kasus invasi Ukraina dari Rusia dan perang saudara di Suriah dengan hubungannya dengan G2. Lalu hegemoni Amerika Serikat dibahas di bagian ketiga dan hegemoni Cina dibahas di bagian keempat.

Di bagian kelima, akan dibahas lebih lanjut mengenai pandangan dunia dari mata Cina, dan pandangan dunia dari mata Amerika Serikat juga akan dibahas pada bab berikutnya. Bagian ketujuh berisi tentang kompetisi hegenomik antara Amerika Serikat dan Cina, lalu di bagian terakhir, seperti judul buku ini "China Push, US endure" akan dibahas.

1.5.2 *Diplomacy Talk with Jung Se Hyun (정세현의 외교 토크)*

Literatur kedua adalah "Talk about diplomacy with Jung Se Hyun" yang merupakan salah satu buku yang akan penulis pakai.

Literatur ini terdiri dari 3 bagian yaitu yang pertama, diplomasi Korea Selatan dengan lingkungan yang berada di tengah negara kuat seperti AS, Cina dan Jepang. Kedua, literatur ini terdiri dari kemampuan dan atau pengetahuan Korea Selatan terhadap Korea Utara. Terakhir, menghilangkan diplomasi Korea Selatan. Buku ini mulai dari frase "Tiada musuh selamanya dan tiada teman selamanya juga". Ini berarti suatu negara bisa jadi musuh tetapi belum tentu itu selamanya jadi musuh. Dengan melalui diplomasi atau proses negosiasi, suatu negara bisa menjadi teman yang baik bagi negara lain walaupun dulu negara tersebut adalah negara musuh. Hubungan di antara negara bisa diubah dan diputuskan juga tergantung situasi. Oleh karena itu diplomasi sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara tetangganya dan merengkuh negara musuh. Korea Selatan sebagai negara satu-satunya yang masih

ada di dalam keadaan negeri yang terbagi ataupun terpisah, sehingga masalah unifikasi adalah masalah dan tujuan utama diplomasi mereka sendiri.

1.5.3 *Unbalanced G2 (G2 불균형)*

Literatur ketiga yang akan dibahas adalah sebuah buku berjudul "Unbalanced G2" karya *Stephen Roach*. Saat ini, di dunia ada istilah G2 yang sering sebutkan oleh dua negara besar, Cina dan AS. Dua negara itu kadang berteman, bermusuhan, atau bahkan bermitra kerja. Karena dua negara itu saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Keputusan dari satu negeri pasti mempengaruhi negeri lainnya. Dan dengan adanya era globalisasi, ketergantungan atas dua negara itu jadi semakin meningkat dan dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 2008 dan 2009, ketergantungan tersebut semakin penting untuk, bukan hanya dua negara tersebut, tetapi juga dunia yang kita sedang jalani. Dua negara itu kerjasama dan ataupun bersaing di banyak bidang seperti ekonomi, keamanan, bantuan manusiawi dan lain-lain. Dan Korea Selatan terletak dekat dengan Cina dan sebagai satu aliansi AS, hubungan AS dan Cina sangat mempengaruhi Korea Selatan. Cina adalah negara yang paling penting untuk ekonomi Korea dan AS adalah negara yang paling penting untuk keamanan. Masalah ekonomi dan keamanan adalah masalah yang paling dasar dan pokok bagi semua negara. Oleh karena itu, menganalisa hubungan antar AS dan Cina dengan tepat sangat penting untuk kepentingan nasional Korea Selatan.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam kebijakan dan strategi terhadap Korea Utara dari pemerintah Korea Selatan dari masa jabatan presiden Korea Selatan Daejung Kim sampai Myeongbak Lee akan dilakukan secara kualitatif deskriptif. Metode ini penulis nilai sebagai metode yang tepat agar pengukuran serta analisa dapat dijalankan dengan efektif dan tepat sasaran dan juga agar pengembangan konsep dan penghimpunan fakta tidak dengan melakukan pengujian hipotesis semata.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Data ini didapatkan melalui sumber pustaka dan pengumpulan data dari membaca buku, jurnal, surat kabar dan media lain seperti internet dan *website* resmi yang terpercaya.

1.7 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari skripsi ini tersusun atas beberapa bab. Pada bab I dalam penelitian ini akan menjelaskan apa yang teliti dan bagaimana penelitian itu dilakukan. Lalu pada bab II dalam penelitian ini akan dijabarkan secara jelas kebijakan presiden Daejung Kim dan Moohyun Roh. Penulis akan menjelaskan dinamika hubungan antar Korea dengan penggunaan kebijakan yang berfokus

pada kerja sama dalam rentang waktu 10 tahun. Pada bab III penulis akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana kebijakan terhadap Korea Utara diubah pada masa jabatan Myeongbak Lee dan melakukan analisis mengenai kebijakan presiden Myungbak Lee yang sifatnya sangat berbeda dengan presiden sebelumnya. Pada bab IV, penulis akan membahas tentang dampaknya dari dinamika kebijakan Korea Selatan pada periode pemerintahan Daejung Kim, Moohyun Roh dan Myungbak Lee terhadap rencana reunifikasi korea. Bab V merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya.